



## EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM SRIKANDI DI LEMBAGA SENSOR FILM KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

M. Rifa'i Eka Pratama<sup>1\*</sup>, Saprudin<sup>a</sup>, Abubakar Iskandar<sup>b</sup>

<sup>a,b,c</sup>Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

*Article history:*

Dikirim tanggal: 19-03-2025

Revisi pertama tanggal: 21-03-2025

Diterima tanggal: 12-04-2025

Tersedia *online* tanggal: 18-04-2025

*Keywords: Evaluation, Implementation, Technology Information and Communication, Srikandi.*

### ABSTRACT

Technological advancements impact various aspects of life, including the governance aspect. The Indonesian government developed an application program aimed at improving the efficiency and effectiveness of correspondence and archiving, which was then named the Integrated Dynamic Archival Information System (Srikandi). This research was conducted to evaluate the implementation of the Srikandi program at the Film Censorship Institute of the Ministry of Culture of the Republic of Indonesia, in order to determine the level of success of the Srikandi implementation at the LSF of the Ministry of Culture of the Republic of Indonesia, as well as to analyze the obstacles faced and the efforts made by policy implementers to overcome these obstacles. The method used is a descriptive qualitative method with implementation theory from Merilee S. Grindle, which analyzes from the content and context aspects, and evaluates the implementation with the theory from Bridgman & Davis with four dimensions: input, process, output, and outcome. The success of the implementation of the Srikandi program policy at the LSF of the Indonesian Ministry of Culture is considered to have been quite good, as seen from the research results through in-depth interviews with informants, supporting documents, and the outcomes of the Srikandi program implementation.

### ABSTRAK

Kemajuan teknologi berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk pada aspek pemerintahan. Pemerintah Indonesia membangun sebuah program aplikasi yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas persuratan dan pengarsipan yang kemudian dinamakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Srikandi di Lembaga Sensor Film Kementerian Kebudayaan RI sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan implementasi Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI serta untuk menganalisis kendala apa saja yang dihadapi dan upaya apa saja yang dilakukan pelaksana kebijakan dalam menyelesaikan kendala tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teori implementasi dari Merilee S. Grindle yang menganalisis dari segi konten dan konteks serta mengevaluasi pelaksanaan dengan teori dari Bridgman & Davis dengan 4 dimensi yaitu input, proses, output dan outcome. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI dinilai sudah berjalan dengan cukup baik, dapat dilihat dari hasil penelitian dengan cara wawancara mendalam dengan para informan, lalu dokumen-dokumen pendukungnya serta dilihat dari hasil pelaksanaan program Srikandi tersebut.

### 1. Pendahuluan

Fenomena perkembangan teknologi yang semakin pesat pada era ini terjadi diseluruh dunia, dimana sangat berdampak pada berbagai sektor kehidupan seperti sektor ekonomi, sosial, hukum dan hingga pemerintahan. Pada saat ini teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan dan bisa

dilihat dalam berbagai segi kehidupan, termasuk dalam sektor pemerintahan yang dimana teknologi informasi dan komunikasi mendapatkan peranan yang sangat penting karena banyak memberikan kemudahan dalam pelayanan hingga pada memaksimalkan proses administrasi negara. Pada dasarnya, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi

<sup>1\*</sup> Corresponding author. M. Rifa'i Eka Pratama; e-mail: rifai.eka@unida.ac.id

banyak membantu dalam memudahkan instansi maupun organisasi dalam kegiatannya (Kurniawan et al, 2020).

Dalam kemajuan teknologi yang sangat cepat dan dinamis menyebabkan berbagai sektor terus meningkatkan kemampuan beradaptasinya dengan teknologi seperti halnya seperti contohnya sektor industri yang dinyatakan oleh Saprudin & Suardi (2022) dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Pengembangan Mutu Organisasi* yang menyatakan bahwa era globalisasi yang salah satunya ditandai dengan reformasi kemajuan teknologi banyak perusahaan *manufacture* dan jasa yang menggunakan dan mengoptimalkan teknologi sebagai alat yang dapat meningkatkan kinerja, produktivitas dan daya saingnya. Terutama sektor pemerintahan harus juga terus meningkatkan daya adaptasi dan fleksibilitas dalam penyesuaian dengan kemajuan teknologi sehingga dibutuhkan penerapan-penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang signifikan dalam proses pemerintahan untuk peningkatan kinerja mulai dari transparansi yang lebih luas hingga pada proses administrasi dan pelayanan yang semakin efektif dan efisien. Terbukti dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin gencar dilakukan pemerintah baik di pusat maupun daerah dapat meningkatkan kualitas pemerintahan itu sendiri karena pada hakikatnya memang teknologi didesain untuk memberikan kemudahan baik dari segi waktu maupun prosesnya. Langkah-langkah penerapan teknologi informasi dan komunikasi jadi tindakan yang harus dan penting dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitasnya.

Perlahan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berinovasi sedemikian rupa dalam pelaksanaan atau penerapan teknologi dan informasi di instansinya, terbukti dengan berbagai program atau aplikasi yang memudahkan proses pemerintahan yang salah satunya yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) yang merupakan salah satu inovasi yang telah dibangun dan diluncurkan serta diberlakukan oleh pemerintah. Aplikasi Srikandi sendiri aplikasi yang berbentuk tatanan naskah surat dan kearsipan yang sudah dilengkapi dengan tanda tangan elektronik untuk membantu pemerintah dalam urusan surat-menyurat, dengan aplikasi Srikandi proses persuratan serta arsip menjadi tidak ada batas lokasi maupun waktu karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Adapun fungsi dari aplikasi Srikandi meliputi bidang pengadministrasian tata kelola kearsipan, lebih mempermudah koordinasi, tracking persuratan, mengembangkan dan meningkatkan mutu layanan publik serta menjadi terintegrasi dengan berbagai instansi

pemerintah yang memang sudah menggunakan aplikasi Srikandi (Rahmah, 2023).

Ada pun teknologi informasi dan komunikasi yang diimplementasikan dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah dikenal dengan nama e-government. E-Government sendiri memang sudah menjadi bagian dari fokus pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja pemerintahan. Untuk E-Government sendiri aturannya berada dalam Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal tersebut membuktikan bahwa dari waktu ke waktu perkembangan tersebut akan menguasai pola kehidupan masyarakat, yang kemudian sistem E-Government perlu dipersiapkan dengan baik dan matang serta fokus. Perkembangan tersebut juga memberikan dampak perubahan dari pelayanan manual pada elektronik yang dimana sebelumnya instansi masih dalam penggunaan kertas dalam sektor administrasinya kemudian berganti menjadi pelayanan berbasis elektronik. Hal tersebut menjadi dasar dalam lahirnya layanan informasi dengan basis elektronik yang pada saat ini sudah berubah menjadi E-Government. (Alfiyah, Nur Inna:2019).

Aplikasi Srikandi sudah di atur dalam regulasi, selaku lanjutan dari Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta percepatan dari pelaksanaan penggunaan SRIKANDI sebagaimana kemudian terdapat dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Kemenpanrb RI 2020).

Aplikasi Srikandi tersebut juga sudah digunakan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI yang dimana Lembaga Sensor Film Kemenbud ini menjadi lokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai aplikasi Srikandi ini. LSF ialah sebuah lembaga yang terdapat dalam Kementerian Kebudayaan yang memiliki tugas dan fungsi untuk menggelar penyensoran pada film hingga iklan film sebelum hal-hal tersebut diedarkan ataupun dipertontonkan kepada masyarakat luas serta melakukan riset dan penilaian pada judul, gambar, tema, adegan, suara, dan teks terjemahan dalam sebuah film ataupun iklan film yang akan disebarakan atau dipertontonkan kepada masyarakat luas. Di LSF sendiri sudah memberlakukan dan menggunakan aplikasi Srikandi dalam perusaratan serta pengarsipan yang dimana memang aplikasi Srikandi ini sangat penting karena surat menyurat dan pengarsipan sudah melalui aplikasi Srikandi sehingga dapat meminimalisir atau menghilangkan penggunaan kertas dalam pelaksanaan

persuratan dan pengarsipan yang menjadikan proses tersebut dapat lebih dimudahkan dan dipercepat sehingga tidak perlu ada lagi proses persuratan maupun pengarsipan yang dilakukan secara manual dan memakan banyak sumber daya maupun waktu menjadikan surat menyurat maupun arsip di LSF lebih terintegrasi dan lebih efektif serta efisien.

Lalu pentingnya aplikasi Srikandi yang digunakan dalam persuratan dan pengarsipan di LSF Kemenbud yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan efisiensi serta efektifitas tata kelola arsip yang dimana aplikasi Srikandi menjadikan pengaturan serta pengelolaan arsip yang lebih baik, sehingga dapat lebih efisien serta efektif dikarenakan dengan aplikasi tersebut dalam pengurusan data dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, artinya dengan Srikandi pengurusan arsip lebih tersusun, teratur, dan lebih mudah dicari serta dipertahankan, lalu lebih mengembangkan keamanan pada data, yang dimana Srikandi lebih dapat memastikan keamanan data arsip yang bersifat digital dengan cara akses yang terbatas khusus untuk orang yang memang berposisi sebagai pengurus data atau yang memang pada dasarnya memegang akses ke aplikasi Srikandi itu sendiri, kemudian mengembangkan transparansi serta akuntabilitas penyelenggara negara atau pemerintah yang dimana pada pengurusan arsip yang memungkinkan pemakaian sistem audit yang merekam segala aktivitas yang terjadi dalam data arsip dan mempermudah proses audit yang dimana dalam proses audit Srikandi itu sendiri dapat mempercepat dan mempermudah data arsip serta lebih membuat mudah auditor dalam mengakses data yang akan diaudit (Rahmah, 2023).

Dengan diberlakukannya aplikasi Srikandi di LSF Kemenbud RI tentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari LSF itu sendiri khususnya dalam hal persuratan dan kearsipan. Namun tujuan baik itu tentu harus dibarengi dengan penerapan yang tepat maka hasil yang diinginkan dapat lebih maksimal. Pada dasarnya aplikasi Srikandi itu dibuat untuk memudahkan pekerjaan surat menyurat dan arsip namun untuk mencapai tujuannya tentu diperlukan SDM kompeten yang menjalankannya guna meningkatkan pelayanan kearsipan di LSF. Dengan diberlakukannya aplikasi Srikandi di LSF Kemenbud RI yang sudah sedari awal menerapkan sistem tersebut dalam rangka peningkatan dan pengembangan tentu diperlukan evaluasi dalam pelaksanaannya sehingga dapat lebih meningkatkan penggunaan aplikasi Srikandi untuk meningkatkan kinerja LSF khususnya dalam bidang pelayanan persuratan dan kearsipan.

Hasil studi awal penggunaan aplikasi Srikandi di LSF Kemenbud RI terdapat beberapa kendala yang

menjadi temuan yang tentunya dapat meminimalisir kualitas pelayanan kearsipan di LSF Kemenbud RI:

1) Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan tidak berkelanjutan dan rutin pada saat adanya pengembangan pembaharuan.

2) Adanya dua sistem persuratan dan arsip, selain adanya Srikandi yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui ANRI, Kemenbud juga memiliki program aplikasi surat dan arsip yaitu Sinda.

3) Masih adanya praktik persuratan maupun arsip konvensional dengan penggunaan kertas.

4) Pegawai yang usianya dekat pensiun sehingga kesulitan dengan penyesuaian kemajuan teknologi dan digitalisasi.

Berdasarkan pada paparan sudah disusun peneliti maka peneliti mendalami dan melakukan penelitian yang berjudul “*Evaluasi Kebijakan Program Srikandi di Lembaga Sensor Film Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia*”.

## 2. Teori

Dalam sebuah kebijakan publik tentu pelaksanaan menjadi sangat penting karena jika tidak ada pelaksanaan atau implementasi maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi angan-angan saja. Setelah dilaksanakan tentu perlu dilakukan evaluasi karena dengan evaluasi maka akan menjadikan keberhasilan sebuah kebijakan akan meningkat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Merilee S. Grindle dan pada analisis evaluasinya menggunakan teori yang dikemukakan Bridgman & Davis (2000).

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis mengenai pengimplementasian program Srikandi menggunakan teori Merilee S. Grindle yang dikutip oleh Nugroho (2009:221) dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang* menyampaikan bahwasanya kesuksesan dalam hal implementasi kebijakan didasarkan pada isi kebijakan serta konteks implementasinya yang dikenal dengan derajat kemampuan implementasi. Kemudian yang dimaksud dengan isi kebijakan ialah yang terkait dengan keperluan publik yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis keuntungan yang dihasilkan, derajat perubahan yang dimaksud, posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasi kebijakan, serta sumber daya yang dihasilkan. Lalu jika dalam hal konteks yang disampaikan dalam model pelaksanaan kebijakan oleh Grindle, ialah terdapat tiga variabel vital yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan. 3 hal tersebut yaitu kekuatan dalam kepentingan aktor yang terlibat, karakter institusi dan penguasa serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap.

Lalu setelah pelaksanaan kebijakan baiknya dikaji dan dianalisis mengenai keberhasilannya dengan evaluasi. Maka disini peneliti melakukan evaluasi terhadap implementasi program Srikandi di LSF guna meningkatkan capaian tujuan yang diharapkan dari program Srikandi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi persuratan dan pengarsipan serta agar persuratan pengarsipan menjadi terintegritas melalui Srikandi ini.

Dalam analisis kali ini peneliti menggunakan pendekatan dengan teori evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh Bridgman & Davis (2000) yang menuturkan bahwasanya pengukuran dalam evaluasi kebijakan publik umumnya dapat mengacu pada empat indikator pokok yang penting untuk diperhatikan yaitu indikator *input*, indikator *process*, indikator *outputs* dan yang terakhir yaitu indikator *outcomes*.

### 3. Metode Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan peneliti mengacu pada hal evaluasi pelaksanaan penggunaan aplikasi Srikandi di Lembaga Sensor Film Kementerian Kebudayaan RI. Dalam hal ini metode pengkajian yang dipakai dalam riset artikel ini ialah pendekatan kualitatif. Dalam Moleong (2016) menuturkan bahwasanya penelitian kualitatif sebetulnya bertujuan untuk mengertikan atau menganalisis fenomena mengenai apa saja yang yang terjadi pada subjek penelitian artikel ini seperti mengenai persepsi, motivasi, perilaku, tindakan dan sebagainya dengan cara menyeluruh serta dengan tata cara deskripsi yang ditampilkan dengan kata-kata atau bahasa dalam suatu hal khusus bersifat alamiah serta dengan cara menggunakan metode-metode alamiah.

Pendekatan penelitian kualitatif ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh gambaran mendalam tentang evaluasi pelaksanaan kebijakan program Srikandi di Lembaga Sensor Film Kementerian Kebudayaan RI.

### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Implementasi Kebijakan Program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI

Pengimplementasian merupakan tahap penting dalam sebuah kebijakan publik. Berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan dapat diukur dalam pengimplementasiannya. Termasuk dalam kebijakan program Srikandi yang menjadi program pemerintah dalam rangka peningkatan digitalisasi di sektor pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sangat

digembor-gemborkan terutama pada saat COVID-19 yang dimana segalanya butuh didigitalisasikan, seluruh dunia mengedepankan digitalisasi termasuk di Indonesia.

Program Srikandi ini tentu membawa tujuan baik yaitu dalam rangka mengefisien dan mengefektifkan kinerja pemerintah di sektor persuratan dan pengarsipan, namun tujuan yang baik harus dibarengi dengan pelaksanaan yang baik sehingga akan benar-benar memberikan dampak sesuai tujuan yang dicanangkan. Peneliti meneliti mengenai program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan ini karena dinilai memiliki kendala-kendala dalam pelaksanaannya karena riset yang baik berawal dari masalah. Maka peneliti memiliki riset ini untuk peningkatan implementasi program Srikandi di Indonesia khususnya di LSF Kementerian Kebudayaan RI.

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis mengenai pengimplementasian program Srikandi menggunakan teori Merilee S. Grindle yang dikutip oleh Nugroho (2009:221) pada bukunya yang berjudul Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang menuturkan bahwasanya kesuksesan penyelenggaraan kebijakan publik didasarkan pada isi kebijakan dan konteks kebijakan implementasinya yang disebut sebagai derajat kemampuan implementasi. Kesuksesan dari suatu penyelenggaraan kebijakan dipaparkan oleh Merilee S. Grindle pada dasarnya kesuksesan pelaksanaan kebijakan mendapat dampak dari yang disebut isi kebijakan serta lingkungan implmentasi kebijakan yang dimaksud.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dalam pengimplementasian program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI ditemukan beberapa temuan penting guna peningkatan keberhasilan implementasi program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan khususnya.

#### 1) Kepentingan yang Mempengaruhi (Konten Kebijakan)

Indikator kepentingan yang mempengaruhi dapat menentukan keberhasilan sebuah program atau kebijakan termasuk program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI. Srikandi sendiri termasuk dalam rangka digitalisasi yang dilakukan pemerintahan atau program tersebut biasa disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tercantum dalam eraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, sehingga memang Srikandi sangat sarat akan. Kemudian kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membuat aplikasi Srikandi. Lalu setiap instansi sektor pemerintah berperan dalam pengoprasian aplikasi

tersebut di instansinya termasuk LSF Kementerian Kebudayaan RI.

Jadi pada dasarnya yang membangun program Srikandi menjadi pengurus Srikandi itu sendiri dan instansi pemerintah lainnya hanya menggunakan dan mengoperasikan termasuk LSF Kementerian Kebudayaan RI. Namun di LSF sendiri semuanya memiliki akun Srikandi sehingga masing-masing bisa masuk ke aplikasi Srikandi dan ada beberapa posisi yang memang menjadi memiliki tugas tambahan seperti Sekretaris Pimpinan yang bertugas mengatur arus surat dari dan untuk pimpinan LSF, arsiparis yang tentunya bertugas mengarsip di Srikandi, Admin Srikandi LSF yang bertugas menyediakan semua akun dan mereset password jika ada masalah password dan tata usaha serta bagian persuratan yang memiliki peranan dalam pelaksanaan Srikandi di LSF.

## 2) Tipe Manfaat (Konten Kebijakan)

Tentu sebuah kebijakan akan memiliki manfaat, tidak terkecuali program Srikandi yang memang dibangun dan dibuat untuk memberikan manfaat dalam hal peningkatan efisiensi dan efektivitas persuratan dan pengarsipan. Untuk membuat sebuah kebijakan memberikan manfaat yang optimal maka harus sejalan dengan pelaksanaan yang optimal juga. Manfaat Srikandi sendiri di LSF tentunya dirasa sudah cukup baik dan banyak seperti halnya mempercepat proses persuratan, lebih mengefisienkan dan mengefektifkan persuratan, persuratan dan pengarsipan lebih transparan dan meningkatkan kinerja persuratan dan pengarsipan LSF Kementerian Kebudayaan RI namun itu belum optimal karena pelaksanaannya juga belum optimal dan untuk pelayanan keluar atau ke pihak yang berhubungan dengan LSF tentu manfaat dari Srikandi dirasa kurang karena pihak yang terkait atau *stake holder* yang berhubungan dengan LSF kebanyakan merupakan pihak swasta jadi pada dasarnya untuk manfaat pelayanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang terkait itu belum dirasakan manfaatnya.

## 3) Derajat Perubahan yang Diinginkan (Konten Kebijakan)

Indikator derajat perubahan yang diinginkan pada pelaksanaan program Srikandi mengenai peningkatan efisiensi dan efektivitas persuratan dan pengarsipan di LSF Kementerian Kebudayaan RI sudah berjalan dengan cukup baik. Srikandi dibangun tentu untuk memberikan dampak perubahan dalam segi kualitas persuratan dan pengarsipan termasuk di LSF Kementerian Kebudayaan RI seperti memberikan kemudahan dalam persuratan dan pengarsipan,

mengembangkan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas persuratan maupun pengarsipan. Perubahan yang diinginkan tentu melalui program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI sudah cukup baik namun masih ada beberapa kendala yang mengurangi keberhasilan sehingga perlu dioptimalkan kembali guna memberikan perubahan yang lebih optimal juga.

Di LSF sendiri ada program yang serupa dengan Srikandi yaitu *Sinde* sehingga ada dua aplikasi berjalan dalam tugas dan fungsi yang hampir sama maka dari itu perlu pengoptimalan penggunaan Srikandi guna memberikan dampak perubahan yang maksimal dalam peningkatan kualitas persuratan dan pengarsipan di LSF Kementerian Kebudayaan RI.

## 4) Letak Pengambilan Keputusan (Konten Kebijakan)

Mengenai indikator letak pengambilan keputusan dalam hal pelaksanaan program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI, segala keputusan yang terkait pelaksanaan program Srikandi itu di Ketua LSF sendiri yang dimana dalam keputusannya Ketua LSF belum mewajibkan semua kegiatan surat menyurat dan pengarsipan melalui Srikandi maka masih ada penggunaan *Sinde*. Ketua LSF memiliki keputusan akhir dan tentu LSF sendiri meyakini bahwa *Sinde* masih dibutuhkan sehingga *Sinde* tidak dilepas yang kemudian menjadi menggunakan dua aplikasi yang serupa. Keputusan ini tentu bisa lebih ditingkatkan karena baiknya mengikuti kebijakan baru jika diwajibkan menggunakan Srikandi baiknya ada keputusan Ketua LSF untuk beralih ke Srikandi atau mengintegrasikannya namun sampai saat ini keputusan masih menggunakan dua aplikasi yaitu Srikandi dan *Sinde*.

Untuk terjadi kendala di LSF tentu termasuk ada di tangan Ketua LSF jika kendala terjadi di sistem maka Ketua akan memberikan arahan untuk berkonsultasi langsung ke pihak pengembang seperti ANRI dan Kominfo. Pada dasarnya mengenai letak pengambilan keputusan ini memang ada di Ketua LSF namun baiknya Ketua lebih berani dalam mengambil keputusan dengan menyesuaikan dalam peraturan baru yaitu program aplikasi Srikandi.

## 5) Pelaksana Kebijakan (Konten Kebijakan)

Mengenai indikator pelaksana kebijakan, hasil analisis menyatakan pelaksana kebijakan sudah dapat dikatakan baik karena pelaksanaan Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI merupakan setiap anggota LSF dan masing-masing orang memegang akun Srikandi jadi pada dasarnya pelaksanaan Srikandi diperuntukan untuk semua anggota LSF dan jika di LSF membuat kebijakan tentang beberapa posisi menjadi pengurus

Srikandi di internal LSF seperti posisi sekretaris pimpinan yang memang mengatur arus persuratan dari para pimpinan LSF baik ke internal maupun urusan persuratan eksternal, kemudian arsiparis yang memang bertugas khusus dalam pengarsipan file ke dalam Srikandi, kemudian ada tata usaha LSF serta ada admin Srikandi, Perlu digaris bawahi, di LSF tidak ada tim khusus Srikandi di LSF dan hanya tambahan tugas dari pejabat yang memang bertugas atau memiliki jobdesk pada persuratan dan untuk seluruh anggota LSF karena semuanya memiliki akun Srikandi namun dengan fitur yang terbatas dan biasanya digunakan untuk menerima surat.

Pada dasarnya pelaksana Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI sudah cukup baik walaupun hanya dengan penambahan pekerjaan kepada beberapa posisi atau jabatan namun dianggap sudah cukup dan Srikandi tetap dapat dijalankan walau belum optimal. Baiknya dibentuk tim khusus untuk pengelola Srikandi sehingga pengimplementasian Srikandi dapat lebih dimaksimalkan atau dioptimalkan sehingga ke depan semuanya bisa beralih ke Srikandi tanpa ada dua aplikasi persuratan dan pengarsipan yang berjalan.

#### 6) Sumber Daya (Konten Kebijakan)

Tentang indikator sumber daya yang dipakai pada pelaksanaan Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI sudah dapat dikatakan cukup karena LSF sendiri hanya menggunakan aplikasi Srikandi saja dan datang memang sudah jadi dan sudah dikembangkan sedangkan untuk biaya perawatan dan pengembangan itu langsung pada lembaga atau kementerian pengembang sehingga tidak ada anggaran khusus di LSF untuk program Srikandi dan LSF juga tidak membentuk tim khusus pengelola sehingga tidak ada tunjangan yang dikeluarkan sehingga membentuk anggaran dan selain dana, untuk fasilitas semuanya sudah cukup bisa dilihat dari tersedianya laptop, komputer untuk setiap pegawai dan tentunya jaringan internet kencang untuk akses Srikandi.

Namun jika dianalisis baiknya memang program Srikandi ini ada tim khusus guna mengelola Srikandi di LSF karena pekerjaan surat menyurat melalui sistem dan pengarsipan tentu dibutuhkan orang khusus terlebih arsiparis hanya tersisa satu orang walau dapat dikatakan cukup untuk SDMnya namun jika dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitas SDM tentu akan berdampak pada peningkatan keberhasilan pelaksanaan program Srikandi.

#### 7) Kekuasaan Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat (Konteks Kebijakan)

Tentu Implementasi kebijakan tidak akan lepas dari kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang

terlibat yang pada pelaksanaan program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI, dalam pelaksanaannya sudah berdasarkan pada landasan hukum dimana landasan hukum tersebut yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, peraturan-peraturan tersebut yang menjadi landasan hukum tersebut menjadi landasan hukum yang kuat dalam penggunaan aplikasi Srikandi termasuk di LSF Kementerian Kebudayaan RI.

Tentu dengan landasan hukum seperti itu, dapat mewajibkan setiap instansi di sektor pemerintahan menerapkan program Srikandi dengan maksimal, namun temuan di lapangan pelaksanaan program tersebut belum dioptimalkan. Mengenai strategi sosialisasi dan pelatihan juga masih dianggap belum cukup karena hanya dilakukan di awal saja namun dengan berbagai upaya sosialisasi dapat ditutupi dengan sosialisasi mandiri dan membaca buku panduan yang padahal LSF sendiri mengalami perubahan pimpinan dan anggota yang tentunya baiknya dilakukan sosialisasi dan pelatihan.

#### 8) Karakteristik Lembaga dan Penguasa (Konteks Kebijakan)

Lalu mengenai indikator karakteristik lembaga dan penguasa dalam pelaksanaan program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI dapat dikatakan cukup baik yang dimana bisa dilihat dari LSF mendukung adanya Srikandi dan menjalankan Srikandi walau belum secara optimal. LSF juga tentu memahami Srikandi memiliki tujuan yang baik untuk mengefisien dan mengefektifkan proses persuratan dan pengarsipan di LSF itu sendiri namun LSF tetap dengan karakternya yaitu mempertahankan aplikasi lainnya yang serupa yaitu Sende sehingga ada dua aplikasi yang berjalan di LSF Kementerian Kebudayaan RI dan untuk pimpinan LSF sendiri mendukung adanya Srikandi dan menjalankan Srikandi sesuai dengan peruntukannya namun kebanyakan hanya untuk eksternal saja seperti menerima surat dan mengirim surat ke lembaga lain dan untuk internal lebih menggunakan aplikasi Sende.

Pada dasarnya baiknya, jika mendukung baiknya gunakan yang memang merupakan peraturan terbaru yang dimana saat ini memang Srikandi yang terbaru dan harus diimplementasikan dengan maksimal. Namun tidak bisa selamanya bergantung pada LSF yang dimana harusnya pemerintah buat lagi peraturan yang menegaskan sanksi dan award untuk pelaksanaan program Srikandi sehingga jelas antara harus dan tidaknya mengutamakan Srikandi yang dimana saat ini

hanya ada penilaian SPBE tanpa ada sanksi dan award yang jelas.

#### 9) Kepatuhan dan Daya Tanggap (Konteks Kebijakan)

Indikator kepatuhan dan daya tanggap pelaksanaan di LSF sudah cukup baik namun jika membahas mengenai kepatuhan ya dapat dikatakan belum optimal karena program Srikandi ini memang diharuskan digunakan secara maksimal untuk peningkatan persuratan dan pengarsipan yang terintegrasi namun karena kebiasaan dan kenyamanan LSF lebih kepada aplikasi Sine sehingga salah satunya tidak dapat dilepaskan dan masih digunakan beriringan, tentu jika membahas patuh maka LSF dapat dikatakan patuh juga karena masih menjalankan aplikasi Srikandi walau dapat dikatakan belum optimal dalam penggunaannya. Hal tersebut disampaikan oleh

LSF Kementerian Kebudayaan RI juga memiliki stake holder yang kebanyakan dari sektor swasta sehingga penggunaan Srikandi terhadap stake holder tidak dapat digunakan karena Srikandi khusus untuk sektor pemerintah. Kemudian untuk daya tanggap sudah cukup baik terlihat dari pelaksanaan program Srikandi walaupun sosialisasi dan pelatihan kurang namun di LSF program Srikandi dapat tetap dijalankan dan digunakan walau ada pergantian pimpinan dan anggota serta adanya kemauan untuk mempelajari dan menggunakan aplikasi Srikandi melalui sosialisasi mandiri maupun melalui panduan dan untuk daya tanggap mengenai masalah atau error dalam aplikasi dilakukan dengan cepat sehingga error yang terjadi tidak berlarut dan menurunkan kinerja Srikandi.

### **B. Evaluasi Kebijakan Program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI**

Suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dilakukan, oleh karena itu perlu tahap implementasi dan setelah implementasi tentu perlu tahap evaluasi dalam setiap kebijakan. Program Srikandi tentunya sudah diimplementasikan dan setelah implementasi baiknya dikaji dan dianalisis mengenai keberhasilannya dengan evaluasi. Evaluasi menurut Purba & Saprudin (2020) dalam bukunya yang berjudul *Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* menyatakan bahwa evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kebijakan publik. Ia merupakan unsur yang penting dalam siklus kebijakan, sama pentingnya formulasi, dan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu kebijakan publik yang berkualitas hanya mungkin dicapai jika siklus itu mendapat perhatian seimbang, dalam hal

formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Maka disini peneliti melakukan evaluasi terhadap implementasi program Srikandi di LSF guna meningkatkan capaian tujuan yang diharapkan dari program Srikandi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi persuratan dan pengarsipan serta agar persuratan pengarsipan menjadi terintegritas melalui Srikandi ini.

Dalam analisis kali ini peneliti menggunakan pendekatan dengan teori evaluasi kebijakan yang dipaparkan oleh Bridgman & Davis (2000) yang dimana menuturkan bahwasanya pengukuran evaluasi kebijaksanaan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yang perlu diperhatikan yaitu indikator input, indikator process, indikator *outputs* dan yang terakhir yaitu indikator *outcomes*.

#### 1) Input

Dalam hal indikator input yang pada dasarnya indikator input merupakan fokus penilaian pada apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. Hasil analisis peneliti mengenai program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI dalam indikator input adalah sumber daya dalam pelaksanaan program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI dapat dinyatakan sudah baik karena di LSF sendiri tidak ada anggaran khusus karena memang pada pembuatan sistem, perawatan hingga pengembangan anggarannya ada di kementerian dan lembaga yang membuat sedangkan untuk LSF sendiri hanya menerima jadi saja dan tinggal menggunakan jadi memang tidak perlu anggaran khusus dan juga tidak ada anggaran untuk tim khusus pengelola sehingga memang tim pengelola khusus Srikandi tidak dibentuk sehingga hanya menambah tugas pada beberapa jabatan atau posisi yang memang tugasnya bersinggungan dengan persuratan.

Dapat dikatakan bahwa untuk SDM sudah cukup sehingga program tetap dapat berjalan namun alangkah baiknya tetap ditambahkan dan jika ada anggaran kedepan bentuk tim khusus pengelola Srikandi karena memang untuk persuratan dan pengarsipan butuh orang khusus ditambah untuk saat ini arsiparis di LSF hanya tersisa 1 dari yang awalnya memiliki 3 arsiparis tentu walau dapat berjalan namun jika tambah kuantitas dan kualitas SDM tentu akan sangat membantu dalam meningkatkan keberhasilan implementasi program Srikandi.

Untuk tujuan Srikandi sendiri setelah penelitian maka peneliti dapat memastikan bahwa setiap anggota

dan pelaksana Srikandi di LSF memiliki pemahaman yang baik mengenai tujuan dari Srikandi itu sendiri.

## 2) Indikator Proses

Kemudian indikator selanjutnya yaitu indikator proses. Indikator proses sendiri merupakan penilaian yang berfokus pada bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat atau kepada pihak yang terkait. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Indikator proses dalam evaluasi program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI dapat dinyatakan bahwa proses persuratan dan pengarsipan di LSF Kementerian Kebudayaan RI menjadi lebih efektif dan efisien dibuktikan dengan dalam proses surat menyurat antar instansi pemerintahan lintas lembaga atau kementerian itu dapat lebih cepat dibanding dengan manual atau email, dan menjadikan proses surat menyurat dan pengarsipan menjadi lebih hemat biaya karena tidak perlu membeli kembali kertas, tinta dan kebutuhan hardfile lainnya.

Dalam hal sudah sesuai prosedural atau tidak, pelaksanaan program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI sudah sesuai prosedural karena berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk melaksanakan program Srikandi walau belum optimal dan tentunya butuh peningkatan prosedural karena di LSF sendiri belum dioptimalkan fitur-fitur yang ada di Srikandi.

### C. Indikator Output (Hasil)

Pada indikator output dalam evaluasi kebijakan program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI. Indikator output atau hasil ini merupakan evaluasi yang menilai pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Dalam analisis evaluasi program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI ini menunjukkan jika memang program Srikandi menghasilkan hasil persuratan dan pengarsipan menjadi lebih tersistematis dan lebih terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintahan di Indonesia dan karena dalam pada Srikandi dalam pengisian kolom harus terisi semua sehingga nantinya persuratan dan pengarsipan lebih tersistematis dan memberikan kemudahan pada saat pengaksesan kembali file surat serta jika ada surat yang kadaluarsa akan dihilangkan atau dimusnahkan secara otomatis serta program Srikandi juga menghasilkan produk persuratan dan pengarsipan lebih terintegrasi karena dengan Srikandi semua instansi sektor pemerintahan menjadi satu dalam sistem Srikandi sehingga setiap instansi pemerintahan bisa saling

berkomunikasi dengan cara surat menyurat dalam lingkup Srikandi.

Kemudian hasil dari program Srikandi di LSF sudah sesuai dengan tujuan utama yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan efisiensi dan lebih mengefektifkan persuratan dan pengarsipan di LSF sehingga dapat diketahui jika dalam hal surat menyurat antar lembaga atau kementerian menjadi lebih mudah, pengarsipan jadi lebih mudah dalam pengaksesan kembali file yang dibutuhkan dan adanya fitur otomatis pemusnahan berkas yang kadaluarsa sehingga memang dari segi hasil program Srikandi memberikan hasil yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan tujuan dibuatnya Srikandi.

Dengan begitu dari segi output atau hasil maka program Srikandi memberikan hasil yang memang baik namun dalam pelaksanaannya belum maksimal sehingga hasil yang diperoleh juga tentu belum maksimal karena masih terbatas dalam beberapa jenis penggunaan saja seperti menerima dan mengirim surat antar instansi yang lebih sering dipakai di LSF sehingga perlu adanya pengembangan dalam penggunaan aplikasi Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI.

### D. Indikator Outcome (Dampak)

Lalu indikator outcome atau dampak dalam evaluasi program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI. Indikator outcome sendiri memfokuskan diri pada penilaian mengenai dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan yang diteliti. Dalam segi dampak, maka program Srikandi tentu memberikan dampak pada persuratan dan pengarsipan di LSF Kementerian Kebudayaan RI. Aplikasi Srikandi memberi dampak persuratan dan pengarsipan menjadi lebih mudah yang dimana terlihat bahwa tidak perlu repot lagi surat menyurat antar lembaga atau kementerian hanya tinggal via aplikasi Srikandi saja dan lebih memudahkan dalam menemukan kembali surat atau file yang sudah tersimpan karena fiturnya memang bagus kemudian persuratan dan pengarsipan juga menjadi lebih cepat yang dimana proses pengiriman surat dan penerimaan surat dapat diakses dengan cepat di aplikasi Srikandi bahkan sampai lintas lembaga atau kementerian dan mengakses kembali file yang diarsip menjadi lebih cepat dari sebelumnya.

Namun stake holder yang berkaitan dengan LSF Kementerian Kebudayaan RI kebanyakan lebih kepada pihak swasta seperti rumah produksi film, iklan dan sebagainya atau perusahaan swasta yang dimana program Srikandi dikhususkan untuk sektor pemerintahan sedangkan LSF kebanyakan berkomunikasi dengan pihak swasta untuk penyensoran film atau video lainnya sehingga dampak untuk stake holder yang berkaitan

dengan LSF Kementerian Kebudayaan dari swasta belum ada.

Jadi dalam indikator dampak atau outcome dari program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI dapat dikatakan belum maksimal karena hanya dirasakan oleh internal dari LSF sendiri namun untuk pihak yang terkena kebijakan yang berkaitan dengan LSF itu tidak terkena dampak karena pada dasarnya program Srikandi untuk sektor pemerintahan dan tidak ada ruang untuk sektor swasta sedangkan stake holder dari LSF yaitu swasta yang bergerak dalam bidang perfilman atau iklan dan lain sebagainya.

### **C. Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI**

Pada implementasi kebijakan atau program pasti tidak akan bisa lepas dari masalah atau kendala yang menjadi menghambat keberhasilan sebuah kebijakan atau program sehingga perlu dianalisis dan dicari sebuah solusi kemudian menjadi sebuah upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut sehingga tingkat keberhasilan sebuah program dapat lebih ditingkatkan.

Tidak terkecuali program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI yang masih ditemukan kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat keberhasilan program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI yang pertama yaitu sosialisasi atau pelatihan yang dilakukan tidak berkelanjutan dan rutin pada saat adanya pengembangan pembaharuan dan hanya dilakukan pada saat tahap awal saja. Walau begitu LSF mengupayakan dengan pelatihan atau sosialisasi mandiri dengan memanfaatkan platform Zoom Meetings Cloud dan membimbing dalam jam kantor terhadap anggota yang baru atau yang belum memahami mekanisme Srikandi serta dengan membaca buku panduan.

Lalu kendala selanjutnya yaitu adanya dua sistem persuratan dan arsip yang digunakan, selain adanya Srikandi yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui ANRI, LSF juga menjalankan program aplikasi surat dan arsip yaitu Sinda yang dimana keduanya memiliki fungsi dan kegunaan yang sama tapi tetap dijalan secara bersamaan. Sinda merupakan aplikasi serupa Srikandi yang dulunya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada saat LSF menjadi bagian dari Kemendikbudristek namun

setelah menjadi Kementerian Kebudayaan aplikasi Sinda masih digunakan dan berjalan yang tentu hal ini dapat menjadi salah satu kendala dalam keberhasilan implementasi program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI.

LSF Kementerian Kebudayaan sendiri melakukan upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan tetap menjalankan kedua program tersebut namun dibagi menjadi dua fungsi berbeda yang dimana Srikandi digunakan dengan pihak eksternal seperti dengan lembaga atau kementerian lainnya sedangkan untuk Sinda digunakan untuk internal LSF. Namun tetap saja jika kedua aplikasi berjalan dapat menghambat efektivitas dan efisiensi program Srikandi.

Kemudian kendala mengenai masih adanya praktik persuratan maupun arsip konvensional dengan penggunaan kertas, tentu ini bersebrangan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau digitalisasi di sektor pemerintahan yang dimana adanya Srikandi justru untuk menekan bahkan menghilangkan praktik persuratan dan pengarsipan konvensional namun di lapangan masih ada praktik persuratan konvensional. Upaya yang dilakukan LSF dalam mengatasi masalah tersebut tentu dengan terus berupaya meningkatkan penggunaan dan implementasi dari aplikasi persuratan dan implementasi karena dengan semakin baiknya pelaksanaan program Srikandi maka akan semakin tidak ada praktik surat menyurat dan pengarsipan secara konvensional dengan kertas.

Masalah selanjutnya yaitu adanya anggota LSF yang memang berada di usia yang mendekati pensiun sehingga kurang melek akan kemajuan teknologi hal tersebut tentu memberikan dampak pada peningkatan SPBE di LSF termasuk Srikandi. Dalam permasalahan berikut, pihak LSF sudah mengikutsertakan pegawainya dalam pelatihan komputer dan digitalisasi baik yang dilaksanakan LSF sendiri maupun lembaga luar seperti Kominfo.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Implementasi kebijakan program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI yang dianalisis dari konten dan konteksnya menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program Srikandi dapat berjalan dengan cukup baik. Baik dari segi konten atau isi kebijakan yang terdiri dari beberapa indikator seperti kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang

diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana kebijakan dan sumber daya dan begitu pun dalam konteks kebijakan atau lingkungan kebijakan yang terdiri dari indikator kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap dapat dinyatakan cukup baik karena program Srikandi dapat tetap berjalan walaupun ada beberapa kendala.

Kemudian mengenai evaluasi kebijakan program srikandi yang dianalisis melalui 4 indikator yaitu input, proses, hasil dan dampak menunjukkan bahwasanya pelaksanaan program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI sudah berjalan dengan cukup baik walau dalam evaluasi tersebut ditemukan beberapa kendala yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program namun program tetap dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Lalu beberapa hal yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI yaitu sosialisasi dan pelatihan yang kurang, adanya dua aplikasi sejenis yang berjalan yaitu Srikandi dan Sinde, masih adanya praktik persuratan dan pengarsipan konvensional dengan kerta dan adanya pegawai yang usianya mendekati pensiun sehingga kurang melek akan teknologi. Dalam upayanya LSF Kementerian Kebudayaan RI melakukan sosialisasi mandiri dan membaca buku panduan awal untuk sosialisasi yang kurang, kemudian dengan dua aplikasi sejenis maka LSF menggunakan kedua aplikasi tersebut dengan membedakan fungsinya yaitu Srikandi untuk keperluan eksternal surat menyurat dan untuk internal menggunakan Sinde serta untuk pegawai yang kurang melek teknologi, LSF mengikutsertakan para pegawai tersebut pada pelatihan komputer dan digitalisasi baik dari lembaga atau kementerian luar seperti Kominfo atau dari LSF sendiri.

## A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan terkait evaluasi kebijakan program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dan dioptimalkan agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pengembangan persuratan dan pengarsipan yang terintegrasi terutama di LSF Kementerian Kebudayaan sebagai berikut:

### 1) Saran Akademik

- a. Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan program Srikandi di LSF Kementerian Kebudayaan RI, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji program Srikandi di

lembaga atau kementerian lain atau pun daerah lain guna mengetahui secara luas mengenai program Srikandi sehingga kedepan pelaksanaannya dapat terus ditingkatkan.

- b. Perlu dilakukan penelitian longitudinal untuk melihat bagaimana efektivitas program Srikandi berdampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi persuratan dan pengarsipan di sektor pemerintah.
- c. Studi lebih lanjut dapat menganalisis pengaruh program Srikandi terhadap kompetensi pegawai dan kualitas pelayanan persuratan dan pengarsipan.

### 2) Saran Praktis

- a. Perlu adanya sosialisasi yang kontinyu dan rutin setiap ada pembaharuan aplikasi dan setiap ada pergantian pimpinan dan anggota pegawai minimal dengan dibuatkan video praktik langsung.
- b. Baiknya menurut penulis, bahwa lepas satu aplikasi kiranya yang mana yang lebih urgent, baiknya dilepas saja dan jalankan 1 aplikasi persuratan dan pengarsipan Srikandi dengan lebih optimal dan maksimal sehingga lebih dapat terasa dampaknya.
- c. Baiknya membuat aturan tegas terkait dilarangnya praktik pembuatan surat konvensional dengan kertas.
- d. Untuk pegawai yang usianya sudah dekat dengan pensiun maka bisa dibimbing oleh mentor dari LSF sendiri yang kemudian di setiap seminggu sekali atau dua kali dapat melaksanakan pelatihan secara mandiri dan bersifat praktik langsung.

## Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adi, S. (2024). Penerapan Metode Tam Untuk Mengukur Penerimaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Dinas Kerarsipan Dan Perpustakaan Kota Jambi (Doctoral dissertation, Sistem Informasi).
- Bahari, K. M., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Pengolahan Arsip Dinamis Melalui Aplikasi SRIKANDI Di Kabupaten Solok. JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(2), 874–879.

- Bridgman, P., & Davis, G. (2000). *The Australian Policy Handbook* (2nd ed.). Allen & Unwin
- Devina, Alfenia Sinta et.al. (2024). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu. *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*.
- Fastyaningsih, A., Rostyaningsih, D., & Warsono, H. 2024. Pengaruh Ekspektasi Kinerja dan Computer Attitude Terhadap Niat Menggunakan Aplikasi Srikandi. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 13(2).
- Febrianti, A. C., Iskandar, A., & Rusliandy, R. (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur melalui Program Samisade Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Ciawi. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(2), 517-529.
- Kurniawan, T., Suyitno, I., & Fawzi, A. 2020. Peningkatan Layanan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 4(2), 238–245.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purba, O., & Saprudin. (2020). *FORMULASI, IMPLEMENTASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK: Dilengkapi Best Practise Studi Penyusunan Naskah Akademis, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Desa*. Bengkulu: Elmarkazi.
- Rahmah, F. (2023). Penerapan electronic government melalui sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (srikandi) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo. *Publika*.
- Saprudin & Suardi, Jon. (2022). *Implementasi Pengembangan Mutu Organisasi (Suatu Pendekatan Kajian Total Quality Manajemen Dan Pendekatan ISO 9002)*. Bengkulu: Elmarkazi.
- Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Intelegensia Media.
- Sugiyono, (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.